

Plagiasi Dua Fitria

by Fitria Ika Siwi Rahayu

Submission date: 25-Jul-2018 01:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 985091027

File name: artikel_Fitria_Ika_untuk_plagiasi.docx (74.1K)

Word count: 5534

Character count: 36345

DERTERMINAN KUALITAS OPINI AUDIT BERDASARKAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KETIDAKTAATAN

Abstrak: Determinan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah ditinjau dari Ketidaktaatan terhadap Regulasi dan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal. Studi ini hendak menguji ketidakpatuhan atas regulasi dan kelemahan sistem pengendalian internal terhadap kualitas opini audit pemerintah daerah. Uji regresi logistik biner dilakukan pada tahun 2014 hingga tahun 2016 terhadap 39 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Jumlah amatan terhadap 117 Kota membuktikan bahwa ketika kelemahan SPI meningkat maka peluang memperoleh opini yang baik bagi pemerintah daerah akan menurun yang mencerminkan kualitas laporan keuangan yang rendah. Selanjutnya, ketidakpatuhan pada perundang-undangan bisa saja ditemukan banyak namun belum tentu temuan tersebut material. Temuan audit kepatuhan juga tidak mempengaruhi tingkat korupsi sehingga tidak berdampak pada opini audit.

Abstract: Determinant of audit opinion quality based on disobedience and the weakness of the internal control system. This research aims to prove disobedience of regulation and the weaknesses of internal control systems on the quality of local government opinion. We used 117 districts/cities in East Java Province from year of 2014-2016. By binary logistic regression, this research proved if the weaknesses of SPI are increase, the chances of obtaining good opinions for local governments will decrease. Furthermore, disobedience to legislation may be found in many but not necessarily material. The compliance audit findings also do not affect the level of corruption so that it does not significantly affect the quality of financial statements.

Kata kunci: Ketidaktaatan terhadap Regulasi, Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Opini BPK.

Tuntutan masyarakat mengenai transparansi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel mendesak pemerintah menerbitkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan dapat diwujudkan melalui perolehan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tuntutan akuntabilitas ini berasal dari banyaknya jumlah penduduk sehingga membuat tekanan dan pengawasan publik. Hal ini mendorong pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian intern yang baik. Selain itu, meningkatnya sumber pendapatan daerah juga menuntut peningkatan pengendalian intern (Yamin & Sutaryo, 2015). Ini berarti, ukuran pemerintah daerah dapat menyebabkan lemahnya sistem pengendalian intern yang selanjutnya akan berdampak pada opini audit. Selanjutnya, menurut (Gideon & Tawanda, 2012), opini merupakan cermin dari pengendalian pemerintahan atas pengelolaan keuangan, yang berarti pula menjadi cerminan atas akuntabilitas, integritas, legimitasi dan konsep *value for money* entitas sektor publik (Attah, 2012; Nwozor, 2011).

Hasil audit dari BPK menunjukkan adanya peningkatan kualitas opini yang diperoleh pemerintah daerah menjadi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga tahun 2015. Opini WTP mengalami pada tahun 2015 adalah 47% kemudian meningkat menjadi 58% di tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa hampir separuh entitas pemerintah daerah memperoleh opini WTP. Atas opini WTP ini, publik masih belum percaya terhadap hasil pemeriksaan BPK. Muncul penilaian baru bahwa laporan keuangan yang dinilai kewajarannya tidak mencerminkan keadaan sesungguhnya. Persepsi ini muncul dari banyaknya korupsi yang terungkap (Auliyana, 2017) pada pemerintah daerah dengan opini WTP.

Penanganan korupsi khususnya pada pemerintah daerah rata-rata mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hanya tahun 2015 saja yang mengalami penurunan menjadi 9 kasus dari 19 kasus di tahun 2014. Sementara pada tahun 2016 mengalami peningkatan kasus sebanyak 11 kasus dari 10 kasus di tahun 2015. Kasus korupsi pada pemerintah daerah menunjukkan relevansi positif terhadap opini (Albrecht, Malagueno, Holland, & Sanders, 2012; Carlson, Cowen, & Fleming, 2014; Dahlstrom, Lapuente, & Teorell, 2012; Ferraz & Finan, 2011; Modugu & Ohonba, 2012; Nicholas Charron & Lapuente, 2010; Rongbing & Yuetang, 2010). Masih mengenai opini, berdasarkan hasil dari pemeriksaan BPK TA 2014, opini di Provinsi Jawa Timur ditemukan menurun sejak dua tahun sebelumnya, yaitu sebelumnya memperoleh WTP kemudian memperoleh opini WTP. Opini ini dikaitkan dengan ketidaktaatan terhadap regulasi dan kelemahan sistem kendali internalnya. Ini berarti, tren peningkatan opini di Jawa Timur tidak sebaik di Provinsi Jawa lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

Perolehan opini WTP TA 2016 di Jawa Timur masih di bawah 80% yaitu 78,9% sementara Provinsi Jawa Barat, DIY, dan Jawa Tengah lebih dari 85%. Dalam hal opini WDP TA 2016, Jawa

Timur memperoleh 21,1%, berada diatas provinsi tersebut. Opini ini didasarkan atas temuan BPK yang secara umum dikaitkan dengan ketidaktaatan terhadap regulasi dan kelemahan sistem pengendalian internal yang berdampak finansial, seperti menyebabkan kerugian daerah dan kekurangan penerimaan. Oleh karena itu, pengendalian internal perlu dikelola secara efektif, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas, mengurangi hilangnya aset, memastikan bahwa catatan akuntansi disusun tepat waktu dan akurat sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara handal (Brandsma & Schillemans, 2013; James, 2010; Li, Xu, & Zou, 2000; Ncgobo & Malefane, 2017; Reichborn-Kjennerud, 2013). Atas dasar inilah, kajian tentang kelemahan sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap regulasi perlu dikembangkan.

Penelitian terkait kelemahan sistem pengendalian internal telah dilakukan oleh (Ncgobo & Malefane, 2017) menunjukkan bahwa jika pemerintah tidak melakukan pengendalian internal secara efektif dan efisien, sehingga berdampak pada kinerja keseluruhan termasuk perolehan opini audit. Sementara itu (Liu & Lin, 2012) menyatakan bahwa deteksi audit dari auditor lokal dapat mendeteksi pelanggaran dan penyimpangan pengeluaran dana pemerintah daerah terhadap tingkat korupsi yang berdampak pada opini audit. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa temuan SPI dan ketidaktaatan terhadap regulasi berdampak negatif terhadap penerimaan opini WTP (Fatimah, Sari, & Rasuli, 2014; Munawar, Nadirsya, & Abdullah, 2016). Ini berarti bahwa jika sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap undang-undang semakin baik maka perolehan opini juga akan semakin baik. Sebaliknya, (Budiawan & Purnomo, 2014; Safitri & Darsono, 2015) tidak berhasil membuktikan kualitas laporan keuangan yang dilihat dari sistem kontrol internalnya. Audit laporan keuangan telah berkembang menjadi ukuran yang produktif untuk menentukan akurasi bagaimana pemerintah daerah telah menggunakan sumber daya keuangan (Modlin, 2016; Monfardini & Maravic, 2012).

Penelitian-penelitian terkait kualitas laporan keuangan entitas publik telah banyak dilakukan, namun belum dilakukan secara khusus di Jawa Timur. Padahal dibandingkan dengan provinsi Jawa lainnya, tren peningkatan opini Jawa Timur tergolong rendah, di bawah 80%. Atau dengan kata lain, perolehan opini WDP lebih tinggi dibanding provinsi Jawa lainnya. Hal ini memotivasi peneliti tertarik untuk meneliti kualitas laporan keuangan melalui opini audit. Padahal sebagai entitas sektor publik, perolehan opini WTP bermaksud untuk menciptakan kepercayaan masyarakat. (Masyitoh, Wardhani, & Setyanigrum, 2015) menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terkait korupsi pemerintah daerah sangat berelasi dengan opini audit. Oleh karena itu, efisiensi dan efektivitas audit dibutuhkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas (Brandsma & Schillemans, 2013; Cabral & Lazzarini, 2014; Ebimobowei & Binaebi, 2013; Funkhouser, 2011; Ijeoma & Sambumbu, 2013). Untuk itu perlu dikembangkan penelitian yang fokus pada kualitas opini audit pemerintah daerah di Jawa Timur, dikaitkan dengan ketidaktaatan terhadap regulasi dan kelemahan sistem kendali internal.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Cara ini dipilih dengan merujuk pada tujuan penelitian yang hendak mengonfirmasi teori tentang kualitas opini audit ditinjau dari ketidaktaatan terhadap regulasi dan kelemahan sistem kendali internal. Data penelitian Tahun 2014, 2015, dan 2016 (semester I maupun semester II) terkait ketidaktaatan terhadap regulasi dan kelemahan sistem kendali internal diperoleh dari IHPS (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester). Sumber data tersebut diperoleh *website* resmi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur yaitu www.surabaya.bpk.go.id. Penelitian ini menggunakan seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur sebagai cakupan populasi; yang mana laporan keuangannya menjadi objek pemeriksaan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 hingga 2016 dan opininya sudah tersedia di Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). Terdapat 39 Kota di Jawa Timur yang menjadi sampel penelitian sesuai IHPS. Amatan selama tiga tahun audit adalah 2014 hingga 2016. Jadi, total amatan menjadi 117. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel secara *cluster (area) sampling*, karena *cluster (area) sampling* merupakan metode pemilihan sampel dari jumlah kelompok dengan jumlah unit yang lebih kecil. Setiap kluster merupakan sub populasi yang bersama-sama membentuk populasi total (Sumarsono, 2004).

Kualitas laporan keuangan diukur menggunakan opini audit yang diperoleh pemerintah daerah. Opini audit merupakan ukuran penting yang menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah menunjukkan akuntabilitasnya kepada publik. Akuntabilitas ini pula yang menjadi tendensi penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih. Selain itu, akuntabilitas yang baik mencerminkan *good government governance* dalam pengelolaan keuangannya (Puspasari & Suwardi, 2012). Jadi, opini audit merupakan bentuk konkrit akuntabilitas dan komitmen pemerintah daerah sebagai entitas public atas tuntutan publik. Opini yang baik membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu menyusun dan melaporkan laporan keuangan secara cermat, kredibel, dan andal. Mengacu pada (Safitri & Darsono, 2015) kategori variabel dependen dalam

penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu predikat 1 (satu) bagi pemerintah daerah dengan opini WTP dan pemerintah daerah dengan opini Non-WTP diberi predikat 0 (nol).

Pengendalian internal tersistem (SPI) menurut Permendagri Nomor 4 tahun 2008 merupakan komunikasi proses manajemen yang harus dikomunikasikan ke publik berupa capaian kinerja yang menggambarkan keandalan pelaporan entitas publik, kepatuhan terhadap regulasi serta sistem kontrol internal yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan. Rancangan atas SPI untuk pemerintah daerah harus berpedoman pada PP nomor 66 tahun 2008.

Bukan hal yang mudah bagi entitas pemerintah daerah dengan segala kompleksitasnya untuk menjamin ketepatanwaktuan dan keandalan laporan keuangannya tanpa pengendalian internal tersistem dan terintegrasi (Atmaja W & Probohudono, 2015). Kelemahan pengendalian internal tersistem diukur berdasarkan temuan yang publikasian BPK untuk setiap pemerintah daerah. Temuan kelemahan SPI dikategorikan menjadi 3, mencakup sistem akuntansi, sistem kontrol internal, dan sistem kendali belanja dan anggaran pemerintah daerah. Data ini dihimpun dari IHPS semester 2014 hingga 2016 (semester 1).

Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dihitung dari jumlah temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. IHPS mengatribusi penyimpangan atas kepatuhan pada perundang-undangan menjadi 7, dimulai dari potensi kerugian dan kerugian, kurangnya penerimaan, dan penyimpangan administrasi. Penelitian ini menggunakan analisis *binnary logistic regression* menggunakan software SPSS. Alat ini dipilih dengan mempertimbangkan variabel dependen merupakan variabel biner atau kategorikal. Dengan kata lain, regresi logistic digunakan untuk memperoleh gambaran pengaruh ketidaktaatan regulasi dan lemahnya sistem kontrol internal terhadap kualitas opini audit yang merupakan variabel biner. Penelitian ini mengkategorikan variabel dependen (opini) menjadi dua yaitu predikat 1 (satu) bagi pemerintah daerah dengan opini WTP dan pemerintah daerah dengan opini Non-WTP diberi predikat 0 (nol). Hal ini sesuai dengan cara yang digunakan (Safitri & Darsono, 2015). Tidak diperlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik dalam regresi logistik (Ghozali, 2011). Model penelitian dimodelkan sebagai berikut,

$$KLK = \beta_0 + \beta_1 SPI + \beta_2 KPU + \varepsilon$$

Keterangan:

KLK = Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (diukur melalui opini)
 β = Konstanta
 SKI = Lemahnya sistem kontrol internal
 KPU = Ketidaktaatan pada regulasi
 ε = Error

Analisis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi *p-value* pada derajat α 0,05. Jika *p-value* menunjukkan nilai > 0,05, dapat disimpulkan bahwa opini audit pemerintah daerah tidak mampu dibuktikan berdasarkan ketidaktaatan pada regulasi dan lemahnya kontrol internal sistemik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Deskripsi statistic dapat memberi gambaran melalui pembacaan atas nilai maksimum, sum, range, varian, standar deviasi, dan nilai rerata (*mean*) (Ghozali, 2011). Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel dependen (Y) kualitas laporan keuangan yang diukur melalui opini (KLK) minimum bernilai 0,00 dan maksimum bernilai 1,00 karena variabel tersebut adalah dibentuk dengan *dummy*, yaitu 0 (nol) untuk pemerintah daerah yang mendapatkan opini Non-WTP dan 1 (satu) untuk pemerintah daerah yang mendapatkan opini WTP. Kemudian variabel (Kelemahan Sistem Pengendalian Intern) SPI memiliki *mean* sebesar 7,62 dengan standar deviasi 3,75, serta nilai minimum 1,00 berarti temuan kelemahan SPI terendah adalah 1 kasus dan nilai maksimum 18,00 berarti temuan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan sebanyak 18 kasus. Sedangkan Ketidakpatuhan pada Perundang-Undangan (KPU) memiliki *mean* sebesar 8,34 dengan standar deviasi 2,92 serta nilai minimum 3,00 berarti temuan kelemahan KPU terendah adalah 3 kasus dan nilai maksimum 17,00 berarti temuan kelemahan KPU terendah adalah 17 kasus.

Tabel 2. Statistik Deskripsi

	N	Minimal	Maksimal	Rerata	Deviasi
KLK	117	,00	1,00	,3590	,48176
SKI	117	3,00	17,00	8,3419	2,92481
KPU	117	1,00	18,00	7,6239	3,75253

Penilaian Keseluruhan Model Fit (*Overall Fit Model*)

Penilaian atas overall fit model dapat menggunakan statistik 2 log Likelihood atau $-2\log L$. Akan terdapat perbedaan nilai $-2\log L$ yang hanya melibatkan konstanta saja dengan $-2\log L$ yang melibatkan konstanta dengan variabel bebas. Jika $-2\log L$ yang melibatkan konstanta dengan variabel bebas bernilai lebih rendah daripada $-2\log L$ yang hanya melibatkan konstanta saja dapat membentuk simpulan bahwa banyaknya variabel independen dapat memperbaiki model fit (Ghozali, 2011). Jadi, pada $-2\log L$ pada *block 0* dan *block 1*, apabila nilai $-2\log L$ pada *block 1* lebih besar dari $-2\log L$ pada *block 0* maka model tersebut merupakan model regresi yang baik.

Tabel 3. Komparasi Nilai dengan $-2\log L$

$-2\log L$	Nilai
<i>Block 0</i>	152.761
<i>Block 1</i>	142.590

Berdasarkan tabel 3 nilai $-2\log L$ dari *block 0* yang awalnya 152,761 menjadi 142,590 pada *block 1*, penurunan $-2\log L$ sebesar 10,171 tersebut berarti penambahan variabel bebas ke persamaan dapat meningkatkan model fit dan juga memperbaiki model regresi (Ghozali, 2011). Ini berarti model dan data fit (cocok).

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien ini dimaksudkan untuk memberi penjelasan kemampuan variabel ketidaktaatan terhadap regulasi dan lemahnya sistem kontrol internal terhadap kualitas opini audit. R^2 dalam regresi logistic dapat dicapai dengan R Square berbentuk Nagelkerke. Model ini memodifikasi koefisien Snell R dan nilai koefisien Cox sehingga dapat dipastikan nilai variatif dalam rentang nol hingga satu. Caranya adalah membagi nilai Snell dan nilai Cox dengan nilai maksimalnya. Nilai R Nagelkerke dianggap baik jika mendekati satu, yang berarti kemampuan menjelaskan variabel terikat semakin baik.

Tabel 4. Pengujian Determinasi

Tahap	Nilai -2 Log	Nilai Cox dan	
		Snell	Nilai Nagelkerke
pertama	142,590 ^a	,083	,114

a. Estimasi kurang dari 0,001.

Nilai determinasi dapat dilihat pada tabel 4. Pada tabel tersebut *R Square Nagelkerke* dari perhitungan SPSS sebesar 0,114 atau 11,4%. Hal tersebut berarti variabel terikat yaitu KLIK dapat dijelaskan oleh SPI dan KPU (variabel terikat) yaitu secara simultan sebesar 11,4%, sedangkan sisanya 88,6% dimungkinkan merupakan atribut yang tidak teruji di dalam model.

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model bermaksud menguji apakah variabel bebas memiliki pengaruh terhadap odds variabel terikat (Gudono, 2015) dan apakah model sesuai dengan data sehingga dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan antara model dengan data atau model fit dengan data. Dalam regresi logistik biner uji kelayakan model dapat ditentukan dari hasil pengujian Hosmer and Lemeshow dengan syarat jika nilai signifikansi Hosmer and Lemeshow $> 0,05$ maka H_0 diterima. Jika signifikansi Hosmer and Lemeshow $< 0,05$ maka hipotesis ditolak. Dapat disimpulkan model tidak fit terhadap data.

Tabel 5. Uji Model Fit

Tahapan	Chi-square	df	Signifikansi
1	9,781	8	,281

Hasil uji kelayakan model dalam regresi logistik ditunjukkan dengan nilai *Lemeshow* dan nilai *Hosmer* dengan nilai probabilitas penerimaan 0,281. Nilai uji model Fit bernilai diatas 0,05

sehingga model diterima. Disimpulkan bahwa karena model fit dengan data observasinya atau dikatakan dapat memprediksi model sehingga dapat dilanjutkan untuk dianalisis secara berlanjut.

Classification Table digunakan untuk menguji kekuatan prediksi model dan mengestimasi nilai yang benar maupun nilai yang kurang benar. Tabel 8 menyajikan bahwa 75 Pemda yang meraih opini Non-WTP, di prediksi terdapat 9 pemerintah daerah dengan opini WTP dan 66 pemerintah daerah dengan opini selain WTP dan, dengan presentase kebenaran 88,0% sedangkan dari 42 pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP di prediksi terdapat 30 pemerintah daerah yang mendapat opini Non-WTP dan 12 pemerintah daerah yang mendapat opini WTP dengan presentase kebenaran 28,6%. Pada nilai *overall percentage* membuktikan bahwa ketepatan prediksi model secara keseluruhan adalah 66,7%. Hasil pengujian tampak sebagai berikut:

Tabel 6. Tabel Klasifikasi

Observasi	Prediksi		
	NON-WTP	WTP	%ase penerimaan
NON-WTP	66	9	88
WTP	30	12	28,6
<i>Overall Percentage</i>			66,7

Sebelum menguji model penelitian, dilakukan pembentukan model regresi. Untuk menghitung dan mengklasifikasi nilai estimasi benar dan salah, disajikan pada prediksi dua kali dua. Nilai tertera pada baris merepresentasi nilai sesungguhnya yang terobservasi atas variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan (opini audit) sementara nilai tertera pada kolom merfer nilai prediksian atas variabel terikat. Semakin baik model maka ketepatan prediksinya akan semakin mendekati 100%.

Hasil Uji Model

Pembentukan model regresi dilihat dari hasil pengujian *variables in the equation* yang disajikan pada tabel 7. Koefisien regresi SPI (X_1) bertanda negatif (-0,168), sama seperti koefisien regresi X_1 , koefisien regresi KPU (X_2) juga bertanda negatif (-0,106). Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh SPI dan KPU terhadap KKK bersifat negatif, artinya penurunan kualitas opini audit merefleksikan lemahnya kontrol internal yang tersistem dan ketidaktaatan terhadap regulasi.

3

Tabel 7. Hasil Uji Model Penelitian

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a SPI	-,168	,076	4,805	1	,028	,846
KPU	-,106	,059	3,186	1	,074	,900
Constant	1,553	,737	4,441	1	,035	4,727

a. Variabel entri dalam persamaan yaitu SPI dan KPU.

Dari tabel *variables in the equation* dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$KPK = 1,553 + -,168 (SPI) + -,106 (KPU) + \epsilon$$

Keterangan:

- KPK = Kualitas LK Pemda yang diukur melalui hasil audit BPK
- SPI = Lemahnya Kontrol Internal Tersistem
- KPU = Ketidaktaatan regulasi
- ϵ = Error

Nilai koefisien regresi variabel SPI -0,168 dengan *p-value* sebesar 0,028 dan tingkat signifikansi α 0,05. Karena *probabilitas* $0,028 < 5\%$ maka pengujian pertama tidak berhasil ditolak. Disimpulkan bahwa variabel SPI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang diukur melalui opini (KPK). Sedangkan, nilai koefisien regresi pada variabel KPU -0,106 dengan *p-value* sebesar 0,074 dan tingkat signifikansi α 5%. Nilai *probabilitas* $0,074 > 5\%$ maka pengujian kedua tidak berhasil diterima. Hal tersebut berarti variabel KPU tidak mempengaruhi kualitas pertanggungjawaban moneter yang diukur melalui opini (KPK).

Pengaruh Lemahnya Kontrol Internal Tersistem pada Kualitas Pertanggungjawaban Moneter Pemda. Pengujian kesatu menggambarkan lemahnya kontrol internal tersistem berdampak negatif pada kualitas pertanggungjawaban moneter Pemda (LK Pemda) yang diukur melalui opini (KLK). Hasil penelitian ini mengonfirmasi hasil telaah empiris (Munawar et al., 2016) dan (Setiyawati, 2016) namun tidak mendukung penelitian (Safitri & Darsono, 2015) dan (Budiawan & Purnomo, 2014).

Hasil uji menunjukkan bahwa lemahnya kontrol internal tersistem (SPI) berelasi negatif pada kualitas pertanggungjawaban moneter Pemda (LK Pemda). Artinya bahwa semakin rendah temuan atas lemahnya kontrol internal tersistem, maka opini yang akan diperoleh pemerintah daerah akan semakin baik. Dengan kata lain, ketika kelemahan SPI di temukan meningkat maka kemungkinan pemerintah daerah memperoleh opini yang baik akan menurun. Hal tersebut tentu akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena sesuai dengan pernyataan PP tahun 2008 Nomor 60 bahwa kontrol internal tersistem (SPI) dilindungi Pemda digunakan untuk memenuhi tuntutan publik memberikan keyakinan yang memadai bahwa Pemda mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan (akuntabel) dalam mengelola aset moneter secara transparan, efektif, dan efisien.

Ini berarti, sistem pengendalian intern telah berfungsi memberi keyakinan memadai akan efisiensi dan efektifitas operasi. Sebaliknya, jika sistem pengendalian internal tidak memadai maka keandalan pelaporan keuangan tidak dapat terpenuhi, laporan keuangan yang disajikan dengan tidak memadainya SPI menjadikan LK tersebut tidak merepresentasi realitas yang sesungguhnya, sehingga LK tersebut dapat dikatakan tidak akuntabel. Selaras dengan hal ini, (Elder, Beasley, Arens, & Jusuf, 2011) menegaskan desain pengendalian internal dimaksudkan untuk memberi keyakinan memadai akan efisiensi dan efektivitas operasi, derajat LK yang andal, dan ketaatan pada regulasi.

Mengenai predikat opini WTP pemerintah daerah, (Auliyana, 2017) menyatakan bahwa opini WTP pemerintah daerah merupakan cara untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Selain itu, opini yang baik membuktikan kemampuan pemerintah daerah mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Pemeriksaan oleh pihak independen yaitu BPK diperlukan untuk menyatakan pendapat demi meningkatkan derajat LK Pemda. Dalam konsep agensi, Pemda adalah pihak agen dan masyarakat merupakan prinsipal, sehingga laporan keuangan yang berkualitas adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Selain itu, laporan keuangan dapat menjadi alat monitoring bagi masyarakat untuk mengurangi adanya asimetri informasi sehingga dapat menurunkan adanya kemungkinan penyelewengan atau korupsi dari pihak agent (Setiyawati, 2016). Entitas sektor publik dapat menerapkan konsep keagenan (Bergman & Lane, 1990; Lane, 2002). Bahkan, kebijakan dan komitmen publik dapat dianalisis melalui pendekatan dan kerangka agen dan prinsipal (Lane, 2013).

Ketika temuan terhadap kelemahan SPI meningkat maka peluang untuk mendapatkan opini WTP semakin menurun. Sehingga hal tersebut mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Ncgobo & Malefane, 2017) menunjukkan bahwa jika pemerintah tidak melakukan internal kontrol secara efisien dan efektif, selanjutnya mempengaruhi kinerja keseluruhan pengendalian internal sehingga mempengaruhi opini audit. Kelemahan SPI mencerminkan besarnya risiko pengendalian, yang terakumulasi dalam peningkatan risiko audit secara keseluruhan serta menurunkan keandalan laporan keuangan. Namun demikian, opini audit tetap bergantung pada materialitas.

Lebih lanjut, (Ncgobo & Malefane, 2017) menjelaskan bahwa ketika pengendalian internal tidak memadai, hal ini dapat menjadi gambaran memungkinkan aset disalahgunakan, keuangan digunakan tanpa hasil, sumber daya umumnya terbuang dan disalahgunakan, karyawan berkinerja buruk, catatan tidak disimpan dan sebagaimana mestinya, kegiatan menjadi tidak efektif. Kegiatan yang tidak efektif membuat instansi publik sulit untuk mencapai tujuan. Lebih spesifik lagi, (Alfiani, Rahayu, & Nurbaiti, 2017) menjelaskan tidak diperolehnya opini WTP seringkali disebabkan oleh penataan aset milik negara belum tertib, penyajian belum sesuai SAP, pengadaan yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kapabilitas SDM yang lemah. Namun demikian, kelemahan SPI tidak mempengaruhi opini disclaimer (Sunarsih, 2013). Banyaknya sumber pendapatan memang meningkatkan masalah pada pengendalian intern sehingga menuntut penyesuaian atas pengendalian intern yang baik (Yamin & Sutaryo, 2015). Artinya, tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal tanpa adanya sistem pengendalian yang baik dan terintegrasi (Atmaja W & Probohudono, 2015).

Pengaruh Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-Undangan terhadap Kualitas LK Pemda. Hasil uji menunjukkan bahwa secara statistik KPU tidak mempengaruhi kualitas LK yang diukur melalui opini (KLK). Adapun temuan ketidaktaatan yang dilaporkan BPK antara lain pada aspek salah

saji dalam laporan keuangan, aspek efektivitas, aspek efisiensi, aspek ekonomis, sehingga menjadi penyebab tidak tercapainya penerimaan dan juga aspek indisipliner dalam administrasi sehingga mendorong merugikan Pemda secara potensial yang pada giliran berikutnya juga berdampak merugikan negara.

SPI juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tahun 2008 Nomor 4 ayat (10) pasal 1 yang mendefinisikan kontrol internal tersistem merupakan sebuah proses yang diciptakan manajemen agar mampu menyajikan keyakinan yang handal terhadap publik tentang kinerja mereka secara keseluruhan meliputi andalnya LK Pemda dan ketaatan terhadap regulasi publik. Andalnya LK Pemda ini sekaligus menjadi cermin pengelolaan aset moneter Pemda secara efisien dan efektif.

Hasil uji secara statistik ini memang tidak berhasil mendukung temuan empiris (Fatimah et al., 2014; Munawar et al., 2016; Setiyawati, 2016), namun, secara empiris penelitian ini sejalan dengan kajian (Alfiani et al., 2017) yang mendeklarasi jumlah temuan audit atas kepatuhan tidak berpengaruh terhadap opini audit. Menurut (Alfiani et al., 2017) temuan yang tidak material lebih banyak dibandingkan temuan yang material meskipun terdapat temuan yang sama dari beberapa tahun sebelumnya, belum tentu temuan tersebut material. Jadi, dapat dikatakan bahwa ketidakpatuhan pada perundang-undangan bisa saja ditemukan banyak namun belum tentu temuan ketidakpatuhan tersebut material.

Menurut SPKN (2017) PSP 200 Paragraf A.16 terkait pedoman memeriksa bahwa materialitas dikaitkan dengan pengaruhnya terhadap keputusan yang diambil oleh pengguna LK. Materialitas ini bisa diukur dengan aspek kualitatif dan kuantitatif. Dianggap material jika berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak-pihak berkepentingan baik dari sisi waktu, sifat, serta cakupan SOP berserta evaluasinya. Namun dalam mempertimbangkan materialitas pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional.

Dalam mempertimbangkan materialitas, memang tidak ada ukuran atau standar bakunya, melainkan terdapat faktor yang patut dipikirkan BPK untuk mengidentifikasi materialitas adalah pertama aspek derajat kepentingan *stakeholder* terhadap obyek pemeriksaan seperti LK Pemda. *Stakeholder* memiliki derajat kebutuhan yang sangat signifikan akan aspek legal formal serta taatnya Pemda pada regulasi publik yang berlaku. Kedua, limit dan cakupan materialitas untuk Pemda biasanya lebih konservatif dibandingkan limit dan cakupan yang diterapkan pada entitas korporasi dan pihak swasta. Entitas sektor publik sangat rentan terhadap uji legal formal dan taatnya entitas pada regulasi yang eksis (Anggraini & Praptoyo, 2017). Jumlah temuan audit atas kepatuhan akan material dan mempengaruhi opini secara signifikan hanya jika temuan itu mencakup kriteria tersebut, serta telah dipertimbangkan secara profesional oleh BPK selaku pemeriksa.

Seperti (Abror & Haryanto, 2014) menjelaskan bahwa temuan audit kepatuhan tidak mempengaruhi tingkat korupsi, dan bahwa kemungkinan pelanggaran tersebut tidak material. Penelitian (Masyitoh et al., 2015) menyatakan bahwa ketika persepsi korupsi menurun maka peluang mendapatkan opini meningkat. Sehingga dalam penelitian ini korupsi dapat dihubungkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah karena jika temuan audit ketidakpatuhan tidak mempengaruhi tingkat korupsi, maka dalam penelitian ini temuan audit ketidakpatuhan juga kurang mempengaruhi kualitas LK yang terukur melalui opini.

Temuan kerugian negara akibat ketidakpatuhan atas regulasi dilaporkan sebanyak 7.282 (tujuh ribu duaratus delapan puluh dua) kasus yang bernilai 7 (tujuh) triliun-an (Atmaja W & Probahudono, 2015). Secara umum, kerugian negara sering disebabkan oleh perbuatan ketidaksesuaian terhadap hukum sehingga menjadi pertimbangan BPK dalam menerbitkan opini.

Penentuan opini sangat bertumpu pada materialitas. Peningkatan temuan audit atas SPI tidak selalu berdampak pada buruknya opini yang diperoleh kota/kabupaten, tergantung dari materialitas/tidak materialnya temuan audit. Mendukung pernyataan ini, (Sudjono & Hoesada, 2009) menegaskan bahwa tingkat materialitas lebih penting banyaknya temuan. Sebagaimana hasil penelitian selama tiga tahun berturut-turut di Kota Cirebon, Cimahi, dan Bandung, temuan audit atas kepemilikan aset tetap tidak mampu mempengaruhi opini disclaimer. Salah satunya adalah bahwa temuan yang material lebih sedikit dari temuan yang tidak material.

Selain itu, alat ukur temuan audit berupa uji kepatuhan terhadap regulasi dan aturan yang berlaku, *fraud*, serta ketidaktaatan yang secara langsung mempengaruhi secara material penyusunan LK (Alfiani et al., 2017). Dengan demikian hanya jumlah temuan audit yang material akan dapat mempengaruhi opini secara signifikan. Jadi, meskipun jumlah temuan audit atas kepatuhan meningkat belum tentu mempengaruhi opini LKPD.

SIMPULAN

Penelitian ini menguji asosiasi lemahnya kontrol internal tersistem (SPI) dan ketidaktaatan terhadap regulasi atau undang-undang (KPU) yang berlaku pada kualitas LK Pemda yang diwakili

opini BPK pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun IHPS 2012, 2013, 2014. Temuan secara statistik mengarahkan penelitian ini pada beberapa simpulan seperti dipaparkan berikut.

Pertama, kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) berelasi negatif pada kualitas LK Pemda yang diproksi melalui opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya jika entitas sektor publik seperti Pemda memperoleh opini yang baik atau terdapat peningkatan opini disimpulkan bahwa kelemahan terkait sistem pengendalian internal akan menurun, dan begitu juga sebaliknya. Kedua, ketidaktaatan pada regulasi atau aturan yang berlaku (KPU) tidak mempengaruhi kualitas LK Pemda yang diproksi oleh opini yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Artinya ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap undang-undang maka hal tersebut tidak mempengaruhi opini BPK. Hal tersebut mungkin disebabkan karena tingkat materialitas. Temuan yang tidak material lebih banyak dibandingkan temuan yang material meskipun terdapat temuan yang sama dari beberapa tahun sebelumnya, belum tentu temuan tersebut bersifat material. Selain itu menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) penentuan materialitas dipengaruhi luasnya cakupan pemeriksaan, waktu, sifat, serta evaluasi *outcome* sehingga membutuhkan pertimbangan profesional. Kabupaten Indramayu misalnya memperoleh 8 (delapan) temuan pada tahun 2014 dan 10 temuan pada tahun 2015, namun tidak menyebabkan menurunnya opini. Tahun 2015, Kabupaten Indramayu meraih opini WTP setelah sebelumnya memperoleh opini WDP di tahun 2014. Jadi kesimpulannya, jumlah temuan hasil pemeriksaan atas ketidaktaatan pada regulasi tidak berelasi signifikan pada opini audit disebabkan tidak materialnya temuan audit di pemerintah daerah.

Peneliti mengakui beberapa keterbatasan dalam tulisan ini. Pertama, variabel kualitas LK Pemda sebagai yang terikat dalam penelitian yang diwakili oleh opini merupakan variabel dummy, sehingga hanya mempunyai dua kategoris (biner). Padahal BPK menyatakan bahwa opini dibagi menjadi empat. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan regresi ordinal agar dapat mewakili tiap-tiap opini audit. Kedua, nilai angka pemrediksi determinasi yang berfungsi untuk menjelaskan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel tak bebas bernilai rendah (11,4%) hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas LK yang diwakili oleh opini tidak dapat dijelaskan seluruhnya oleh variabel kontrol internal tersistem (SPI) dan ketaktaatan pada regulasi dan aturan yang berlaku (KPU). Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mendekati pada variabel lain yang lebih dekat pada kualitas LK Pemda.

REFERENCES

- Abror, S., & Haryanto. (2014). Audit pemerintah dan pengendalian korupsi: bukti dari data panel provinsi di Indonesia. *Diponogoro Journal of Accounting*, 3(4), 1–11.
- Albrecht, C., Malagueno, R., Holland, D., & Sanders, M. (2012). A cross-country perspective on professional oversight, education standards and countries' perceived level of corruption. *Cross Cultural Management: An International Journal*, 19(4), 433–454. <https://doi.org/10.1108/13527601211269978>
- Alfiani, A. N., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Jumlah Temuan Audit Atas Sistem Pengendalian Intern dan Jumlah Temuan Audit Atas Kepatuhan Terhadap Opini LKPD Pemerintah Kota/Kabupaten di Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer (JRAK)*, Volume 9,(1), 12–19.
- Anggraini, N., & Praptoyo, S. (2017). FAKTOR YANG MENYEBABKAN OPINI AUDITOR ATAS LAPORAN KEUANGAN WAJAR DENGAN PENGECUALIAN. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2).
- Atmaja W, R. S. A., & Probohudono, A. N. (2015). Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara. *Jurnal Integritas*, 1(1), 81–110.
- Attah, A. W. (2012). An Evaluation of the Performance of the Nigerian Economy under the Democratic Rule: 2000–2009. *Journal of Sustainable Development in Africa*, 14(7), 144–155.
- Auliyana, E. (2017). Studi Kasus Fenomenologi Atas Opini Audit Wtp Di Kalangan Pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 4(1), 22–33. Retrieved from <http://journal.um.ac.id/index.php/jaa>
- Bergman, M., & Lane, J. E. (1990). Public Policy in a Principal-Agent Framework. *Journal of Theoretical Politics*.
- Brandsma, G. J., & Schillemans, T. (2013). The accountability cube: Measuring accountability. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 23(4), 953–975. <https://doi.org/10.1093/jopart/mus034>
- Budiawan, D. A., & Purnomo, B. S. (2014). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN KEKUATAN KOERSIF TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di wilayah I Bogor Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 276–288.

- Cabral, S., & Lazzarini, S. G. (2014). Guarding the Guardians : An Analysis of Investigations against Police Officers in an Internal Affairs Division. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(3), 787–829.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/muu001>
- Carlson, D. E., Cowen, J. M., & Fleming, D. J. (2014). Third-party governance and performance measurement: A case study of publicly funded private school vouchers. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 24(4), 897–922.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mut017>
- Dahlstrom, C., Lapuente, V., & Teorell, J. (2012). The Merit of Meritocratization: Politics, Bureaucracy, and the Institutional Deterrents of Corruption. *Political Research Quarterly*, 65(3), 656–668.
- Ebimobowei, A., & Binaebi, B. (2013). An Examination of the effectiveness of auditing of local government financial reports in Bayelsa State , Nigeria. *Current Research Journal of Social Sciences*, 5(2), 45–53. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2008.03.002>
- Elder, R. J., Beasley, M. S., Arens, A. A., & Jusuf, A. A. (2011). *Jasa Audit dan Assurance (Adaptasi Indonesia)* (Terjemahan). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Fatimah, D., Sari, R. N., & Rasuli, M. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya Dan Umur Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi Media Riset Akuntansi Dan KEUANGAN*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Ferraz, C., & Finan, F. (2011). Electoral accountability and corruption in local governments: evidence from audit reports. *American Economic Review*, 101(June), 1274–1311.
<https://doi.org/10.1257/aer.101.4.1274>
- Funkhouser, M. (2011). *Accountability, Performance and Performance Auditing: Reconciling the Views of Scholars and Auditors*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*.
- Gideon, Z., & Tawanda, Z. (2012). Auditing Government Institutions in Zimbabwe Frameworks, Processes and Practices. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 2(2), 218. <https://doi.org/10.5296/ijaf.v2i2.2528>
- Gudono. (2015). *Analisis Data Multivariat* (4th Editio). Yogyakarta: BPF.
- Ijeoma, E., & Sambumbu, A. (2013). A framework for improving public accountability in South Africa. *Journal of Public Administration*, 48(2), 282–298.
- James, O. (2010). Performance Measures and Democracy: Information Effects on Citizens in Field and Laboratory Experiments. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 21(3), 399–418. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/muq057>
- Lane, J. E. (2002). *New Public Management An Introduction* (2nd Editio). London: Routledge.
- Lane, J. E. (2013). The Principal-Agent Approach to Politics: Policy Implementation and Public Policy-Making*. *Open Journal of Political Science*, 3(2), 85–89.
- Li, H., Xu, L. C., & Zou, H. (2000). Corruption , Income Distribution , and Growth. *Economics and Politics*, 12(2), 155–181.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186.
<https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyanigrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. In *Seminar Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara Medan* (pp. 1–26).
- Modlin, S. (2016). Increasing Creasing Transparency and Efficiency: An Examination of County Government Note Disclosures. *Public Administration Research*, 5(2), 59.
<https://doi.org/10.5539/par.v5n2p59>
- Modugu, P. K., & Ohonba, N. (2012). Challenges of Auditors and Audit Reporting in a Corrupt Environment. *Research Journal of Finance and Accounting*, 3(5), 2222–2847.
- Monfardini, P., & Maravic, P. von. (2012). Municipal Auditing in Germany and Italy: Explosion, Change, or Recalcitrance? *Financial Accountability & Management*, 28(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-0408.2011.00536.x>
- Munawar, M., Nadirsya, N., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Jumlah Temuan Audit atas SPI dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan Terhadap Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(2), 57–67.
- Ncgobo, P., & Malefane, S. R. (2017). Internal controls, governance and audit outcomes Case of a South African municipality. *African Journal of Public Affairs*, 9(5), 74–89. Retrieved from

- http://journals.co.za/docserver/fulltext/ajpa_v9_n5_a9.pdf?expires=1519816571&id=id&acname=guest&checksum=D5B7A507B0A92515FEFDF3AF1FB0D3B7
- Nicholas Charron, & Lapuente, V. (2010). Does democracy produce quality of government? *European Journal of Political Research*, 49(4), 443–470.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2009.01906.x>
- Nwozor, A. (2011). Bureaucratic and Systemic Impediments to Public Accountability in Nigeria. *International Journal of Politics and Good Governance*, 2(2), 1–20.
- Puspasari, N., & Suwardi, E. (2012). *Pengaruh Moralitas Individu dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Eksperimen Pada Konteks Pemerintahan Daerah*. Universitas Gadjah Mada.
- Reichborn-Kjennerud, K. (2013). Political Accountability and Performance Audit: The Case of the Auditor General in Norway. *Public Administration*, 91(3), 680–695.
- Rongbing, H., & Yuetang, W. (2010). The Empirical Study on Provincial Government Audit Quality (2002-2006). *Accounting Research*, 6, 70–76.
- Safitri, N. L. K. S. A., & Darsono, D. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit Pada Pemerintah. *Diponogoro Journal of Accounting*, 5(1), 1–12.
- Setiyawati, H. (2016). Effect of Weaknesses of the Internal Control Systems and Non-Compliance with Statutory Provisions on The Audit opinion of The Audit Board of The Republic of Indonesia. *International Journal of Engineering Research and Application*, 6(9), 2248–9622.
- Sudjono, M., & Hoesada, J. (2009). Strategi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Majalah Akuntansi Indonesia Edisi No. 15/Tahun III/Maret 2009*, 56–61.
- Sumarsono, S. (2004). *Metode Riset Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunarsih. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Opini Disclaimer BPK Terhadap Laporan Keuangan Di Lingkungan Departemen di Jakarta*. Universitas Gunadarma Jakarta.
- Yamin, R., & Sutaryo. (2015). Faktor Penentu Jumlah Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah di Indonesia. In *Simposium Nasional Akuntansi XVIII Medan*. Medan.

Plagiasi Dua Fitria

ORIGINALITY REPORT

2%

SIMILARITY INDEX

2%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

publikasiilmiah.ums.ac.id

Internet Source

<1%

2

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1%

3

Submitted to iGroup

Student Paper

<1%

4

foristkupang.org

Internet Source

<1%

5

id.scribd.com

Internet Source

<1%

6

media.neliti.com

Internet Source

<1%

7

e-journal.uajy.ac.id

Internet Source

<1%

8

eprints.unsri.ac.id

Internet Source

<1%

9

Risna Nurjanah, Ade Sofyan Mulazid.
"Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Corporate

<1%

Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan", Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2018

Publication

10

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Plagiasi Dua Fitria

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10
